

Laporan :

## **Pelatihan dan Pendampingan Teknis Fasilitator Musrenbang Kecamatan**

**Kuala Kurun, 6 – 8 Februari 2013**

### **Prolog :**

Keberadaan fasilitator dalam sebuah forum musyawarah yg partisipatif sangat dibutuhkan, agar pengelolaan forum berjalan efektif. Salah satu tugas Fasilitator untuk memastikan agar musyawarah bisa berjalan secara partisipatif dan bisa menghasilkan sebuah keputusan yang berkualitas. Forum musyawarah warga yang setiap tahun diselenggarakan oleh pemerintah daerah, adalah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan salah satu tahapannya yaitu musrenbang kecamatan.

Musrenbang kecamatan merupakan forum partisipasi warga untuk merencanakan pembangunan di kecamatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) . Agar musrenbang kecamatan bisa menghasilkan keputusan yg berkualitas, maka forum tersebut harus dikelola secara benar dan salah satunya dengan menghadirkan fasilitator yang handal dan terampil.

Pelatihan Fasilitator Musrenbang Kecamatan yg diselenggarakan oleh Pemda Gunung Mas bekerjasama dengan YTS, merupakan upaya untuk mempersiapkan para Fasilitator di Musrenbang Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dengan peserta dari staf kecamatan dan fasilitator PNPM di lima kecamatan (3 Kecamatan dampingan YTS dan 2 Kecamatan merupakan pilot Proyek Pemda).

### **Hari Pertama :**

Kegiatan diawali dengan melakukan penggalian pengetahuan peserta tentang seputar musrenbang kecamatan (proses, substansi dan output). Dilakukan dengan cara mengisi lembaran pre test bagi setiap peserta dan mendiskusikan secara kelompok tentang jenis2 dokumen perencanaan dan harapan terhadap pelatihan. Diperoleh gambaran bahwa pemahaman terhadap Musrenbang Kecamatan cukup beragam (proses dan substansi). dan menunjukkan bahwa pengetahuan peserta masih belum memadai. Dengan mengetahui pemahaman peserta seperti itu, fasilitator kegiatan memulai sesi-sesi pelatihan. Harapan peserta terhadap pelatihan, secara umum bisa meningkatkan pengetahuan tentang proses musrenbang (kerangka hukum) dan mampu mengembangkan teknik- teknik fasilitasinya.

Peserta diajak untuk mendiskusikan kerangka hukum dan pengenalan dokumen dengan cara diskusi kelompok dan sekaligus juga ajang praktik bagaimana menggunakan media/alat bantu. Peserta diberikan contoh/tips cara fasilitasi forum musyawarah yang partisipatif. Dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung untuk mengembangkan

pengetahuan peserta dan sekaligus menjadi ajang penggalian tentang pemahaman peserta terhadap kerangka hukum perencanaan penganggaran dan prosesnya. Gambaran diperoleh bahwa secara keseluruhan peserta belum memahami tentang proses tahapan perencanaan penganggaran berikut hasil dokumen yg dihasilkan dari setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Peserta diajak untuk mendiskusikan tentang berbagai peran fasilitator yang bisa dijalankan dalam dalam proses Musrenbang. Diskusi tentang perbedaan antara peran pemabwa acara, moderator dan fasilitator, dibahas dan didiskusikan agar peserta mampu membedakan tugas dan peran dari peran masing-masing.

Untuk menyegarkan peserta maka di sela-sela sesi dilakukan dinamika kelompok, dengan menggelar “permainan” untuk meningkatkan daya ingat dan soliditas peserta. Dinamika kelompok menjadi bagian dari rangkaian kegiatan agar peserta tidak jemu dan merasa monoton.

#### **Hari kedua :**

Fokus pembahasan di hari kedua adalah melakukan praktek kompilasi dokumen hasil musrenbang kelurahan dan melakukan simulasi. Setiap peserta dari masing-masing kecamatan untuk mememeriksa dokumen hasil musrenbang kelurahan di kecamatan masing-masing. Selanjutnya kegiatan kompilasi dokumen hasil musrenbang kelurahan dilakukan di kelompok masing-masing kecamatan. Cara pendokumentasian hasil musrenbang kelurahan ternyata formatnya cukup beragam, dan peserta diperkenalkan dengan berbagai format isian dan sekaligus melakukan praktek pengisian format tersebut. Paraktek pengisian format ini sekaligus menjadi ajang pengenalan bagi peserta untuk bisa membedakan tentang usulan, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan mana yang menjadi kewenangan desa. Peserta diajak untuk mendiskusikan secara mendalam tentang kewenangan Desa dan Kewenangan Kabupaten. Pemahaman ini penting agar peserta mampu membedakan/memilah hasil musrenbang Desa berdasarkan kewenangan tersebut. Kompilasi (pengisian format) yang sudah dibedakan berdasarkan kewenangan dijadikan sebagai bahan untuk musrenbang kecamatan.

Tahapan-tahapan Musrenbang Kecamatan dibahas secara detail. Proses pra musrenbang-pelaksanaan dan paska musrenbang, menjadi bahasan di setiap kelompok dan sekaligus dilakukan simulasi secara bergantian. Proses simulasi ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman peserta dan peningkatan kapasitasnya dalam menggunakan media/alat bantu serta sekaligus bisa memberikan gambaran secara visual bagaimana pelaksanaan dari setiap tahapannya. Dari proses ini didapatkan gambaran bahwa proses musrenbang kecamatan yang dilaksanakan selama ini, berbeda dengan aturan normatifnya. Peserta diperkenalkan dengan istilah Tim Penyelenggaran Musrenbang (TPM), yang terdiri dari unsur kecamatan dan unsur masyarakat yang mempunyai keterampilan fasilitasi.

Setiap peserta dikelompokkan berdasarkan kecamatan, dan melakukan simulasi secara bergantian tentang tahapan pra musrenbang secara bergantian. Setiap kelompok diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok lainnya setelah melakukan simulasi. Diakhiri dengan penyusunan agenda Musrenbang secara bersama-sama untuk dijadikan sebagai pegangan bagi pelaksanaan musrenbang di kecamatan masing-masing.

### **Hari ketiga :**

Masih melanjutkan simulasi Musrenbang kecamatan, dengan fokus pada tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Setiap peserta dari kecamatan masing-masing mensimulasikan tentang pelaksanaan musrenbang kecamatan. Simulasi ini menekankan pentingnya peran dari Tim Penyelenggaran Musrenbang (TPM) agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Peserta melakukan *role play* agar bisa merasakan secara “visual” suasana musrenbang yang sebenarnya. Simulasi merupakan ajang untuk melihat kemampuan peserta dalam hal penguasaan teknik-teknik fasilitasi.

Dari praktek simulasi ini, bisa tergambaran kemampuan dari setiap peserta dalam menjalankan perannya masing-masing. Dilakukan secara bergantian dan setiap peserta bisa memberikan komentar terhadap praktek simulasi dari kelompok lainnya.

Simulasi ini menekankan pentingnya menjalankan peran dari masing-masing TPM agar pelaksanaan Musrenbang bisa efektif. TPM harus mampu mengawal proses pelaksanaan musrenbang agar bisa menghasilkan keluaran yg diharapkan yaitu adanya kesepakatan program usulan kecamatan dan delegasi masyarakat yang akan terlibat dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten

Dari proses simulasi pelaksanaan Musrenbang kecamatan, yang paling “berat” adalah tahapan penyepakatan program prioritas kecamatan. Fasilitator benar2 diharapkan mampu menggunakan media alat bantu, agar proses tersebut tidak menjadi “kacau” dan tdk menghasilkan kesepakatan. Penekanan pentingnya prinsip musyawarah sebelum melakukan metode skoring harus lebih dikedepankan oleh Fasilitator Musrenbang.

Diakhiri dengan pengisian post test, setiap peserta diminta untuk mengisi pertanyaan yang sama pada saat awal pelatihan. Hasil dari post test pelatih bisa melihat sejauhmana perkembangan peserta antara sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan.

### **Penutup**

Dari serangkaian pelatihan selama tiga hari, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, praktek dan simulasi, bisa memberikan pemahaman baru kepada peserta tentang pentingnya fasilitator musrenbang di setiap tahapan musrenbang. Pengetahuan tentang kerangka hukum, keterampilan penggunaan alat-alat bantu, merupakan prasyarat agar fasilitator bisa menjalankan tugas-tugas fasilitasinya pada saat musrenbang kecamatan.

Hasil dari pre test dan post test, terlihat ada perkembangan pengetahuan dari setiap peserta secara umum. Bahkan untuk beberapa peserta cukup pesat kemajuannya. Sementara bila dilihat dari praktek simulasi, masih perlu terus melakukanditingkatkan tentang keterampilan peserta dalam menggunakan alat bantu. Perlu diberi kepercayaan untuk melakukan fasilitasi secara reguler agar kemampuannya terus meningkat.

Nandang Suherman.